



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
JL. Dr. CIPTO 33 TELPON (0328) 662122

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke- III pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Februari 2023

Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP



Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196608081986031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian Kinerja Organisasi	50
B. Realisasi Anggaran	110
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	116
BAB IV PENUTUP	148
LAMPIRAN	149
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep mempunyai tugas : membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta tugas pembantuan.

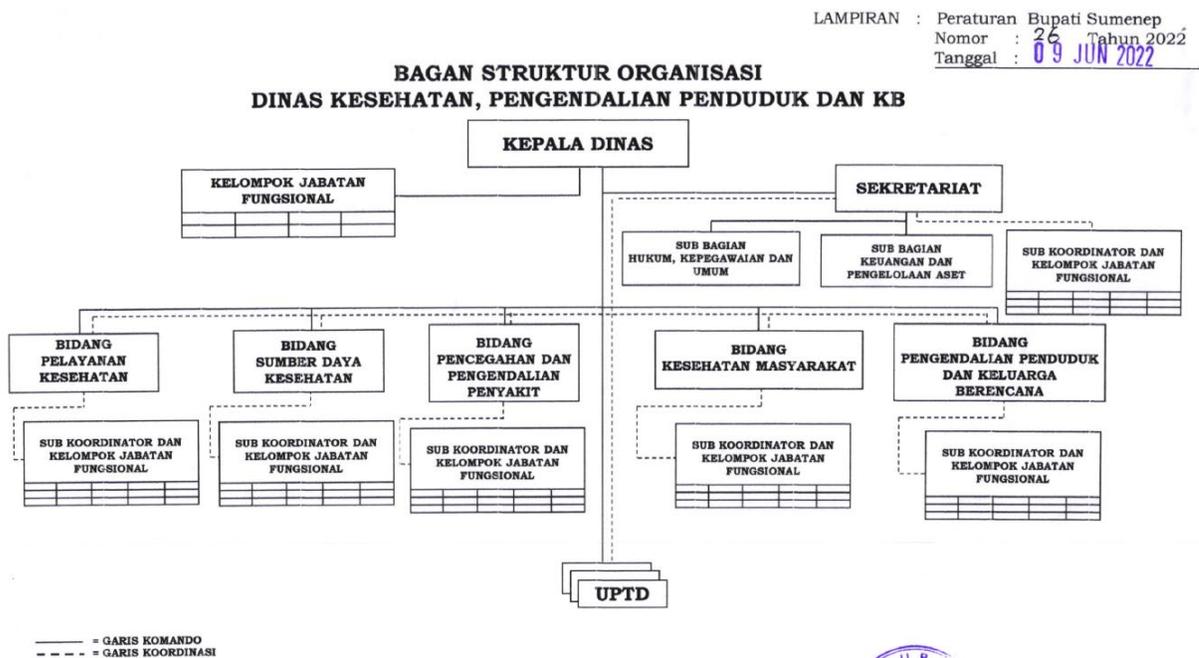
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan pelaporan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penurunan AKI dan AKB yang lambat;
2. Prevalensi stunting yang masih tinggi;
3. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat;
4. Belum semua penduduk di Kabupaten Sumenep menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Sistem rujukan pelayanan Kesehatan masih belum optimal;
6. Sistem Informasi Kesehatan yang belum terintegrasi menjadi satu;
7. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga serta kualitasnya;
8. Pencapaian MKJP masih rendah;
9. Unmet Need masih tinggi;
10. Peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal;

11. Adanya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga Kencana;
12. Pelaksanaan program Bangga Kencana belum merata disemua wilayah;
13. Tenaga PKB/PLKB kurang memadai dibanding dengan jumlah desa/kecamatan yang ada;
14. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak serta Gizi Masyarakat;
2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Faskes;
4. Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan bidang Kesehatan;
5. Meningkatkan pengadaan dan Distribusi SDM Kesehatan yang merata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Mengembangkan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
7. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB;
8. Meningkatkan kualitas pemenuhan alokasi pada fasilitas Kesehatan;
9. Meningkatkan penguatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana melalui kelompok Tribina;
10. Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan kinerja;

11. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN**
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV PENUTUP**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan

fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	0,789	0,79	0,791	0,792	0,792	
		1.	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,78	72	72,22	72,44	72,66
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	85	85	85	
			Total Fertility Rate (TFR)	2,13	2,03	1,93	1,83	1,73	

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		Nilai	Kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	Badan Pusat Statistik
1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	AHH dikenal dengan e0 merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth) atau suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. AHH dihitung setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik, BPS memerlukan data AKI dan AKB untuk menghitung AHH	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Badan Pusat Statistik
		1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan RSUD Moh. Anwar	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> SKM Unit pelayanan x 25 </div>	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		1.3 Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	Anak	Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <ul style="list-style-type: none"> • i = kelompok umur (15-19) th s/d (45-49)th • $ASFR_i$ = jumlah kelahiran per 1000 perempuan kel umur (15-19)th s/d (45-49) th • Total Fertility Rate adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya. 	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	Nilai	0,79	0,79	
		1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72	72
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85
				Total Fertility Rate (TFR)	Anak	2,03	2,03

NO.	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 137,823,404,279	Rp 159,904,441,665
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD H. MOH. ANWAR)	Rp 10,319,899,027	Rp 11,610,647,827
3	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1,266,600,100	Rp 807,259,050

NO.	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 18,790,750	Rp 12,889,199,600
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 11,937,549,600	Rp 485,399,800
6	Pengendalian Penduduk	Rp 485,399,800	Rp 6,514,485,787
7	Pembinaan Keluarga Berencana	Rp 6,290,232,337	Rp 5,833,773,490
8	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp 6,058,026,940	Rp 217,541,943,723
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 165,917,710,711	Rp 158,972,584,111
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD H. MOH. ANWAR)	Rp 153,551,995,097	Rp 12,889,199,600
JUMLAH ANGGARAN		Rp 493,669,608,641	Rp 574,578,525,803

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 Nopember 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	Nilai	0,79	0,79
1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72	72
		1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85
		1.3	Total Fertility Rate (TFR)	Anak	2,03	2,03

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	91.30%	91.30%	165,917,710,711	217,541,916,396
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	59,311,000	56,311,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17 dokumen	17 dokumen	31,249,000	28,249,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	3,392,950	3,392,950
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	3,025,650	3,025,650
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	3,042,250	3,042,250
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	3,018,550	3,018,550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	5,214,700	5,214,700
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	10,367,900	10,367,900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	10 laporan	10 laporan	91,033,156,146	91,287,781,816
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1367 orang/bulan	1367 orang/bulan	90,983,156,346	91,237,782,016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	5,059,900	5,059,900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	12 laporan	12 laporan	44,939,900	44,939,900
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	1 jenis	1 jenis		76,873,050
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	171 paket	171 paket		76,873,050
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	7 jenis	7 jenis	1,413,063,046	1,459,261,606
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	11,119,000	11,119,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket	24,231,900	24,231,900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	36 paket	995,604,986	1,041,803,546
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	28,323,600	28,323,600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	170 Dokumen	170 Dokumen	38,113,000	38,113,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	560 Laporan	265,676,000	265,676,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 dokumen	10000 dokumen	49,994,560	49,994,560
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	12 bulan	12 bulan	402,785,372	402,785,372
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4800 Laporan	4800 Laporan	402,785,372	402,785,372

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	47 unit	47 unit	209,395,147	209,395,147
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 unit	8 unit	137,659,200	137,659,200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	46 unit	30,460,000	30,460,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	41,275,947	41,275,947
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD	31 faskes	31 faskes	72,800,000,000	124,049,508,405
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batuan)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	833,349,559	1,850,642,436

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pragaan)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	4,092,047,893	6,991,337,758
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bluto)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	3,180,369,519	4,766,037,801

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalianget)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,337,579,86 2	3,722,059,15 5
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Talango)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,033,925,01 9	3,369,218,31 5

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandian)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	1,211,109,354	1,913,078,602
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rubaru)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,398,498,206	3,575,305,523

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Legung)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	1,024,846,739	1,922,098,210
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dasuk)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,034,707,066	2,870,103,242

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manding)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	1,614,915,103	2,925,886,221
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Moncek)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	1,717,533,779	2,702,954,522

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lenteng)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,088,179,59 ₂	3,357,333,62 ₁
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batang-Batang)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,244,688,44 ₈	3,884,638,45 ₁

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Saronggi)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,552,809,195	4,982,366,535
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pamolokan)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	1,822,586,706	2,440,671,058

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dungkek)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,132,252,566	3,595,055,709
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambunten)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,745,274,695	4,959,465,401

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasongsongan)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,763,015,358	5,184,314,508
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Putih)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,317,192,951	3,990,463,881

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gapura)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,201,174,938	3,448,234,148
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Guluk-Guluk)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,769,786,105	4,931,161,390

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ganding)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,378,118,247	3,936,324,798
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Raas)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	3,352,233,674	6,531,770,442

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Giligenting)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	2,374,357,295	3,994,003,814
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nonggunong)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	1,111,073,177	2,033,969,516

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayam)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	3,323,487,548	6,401,543,605
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Arjasa)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	6,161,663,249	9,181,428,895

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kangayan)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	1,779,072,699	2,943,638,445
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sapeken)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	100 %	4,852,750,635	8,425,422,164

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Masalembu)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	1,351,400,823	3,218,980,239
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	91,3 /100.000 KH	91,3 /100.000 KH	109,210,084,054	131,082,137,223
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasaranan di fasilitas kesehatan sesuai standar	60.00%	60.00%	32,654,841,964	34,594,888,433
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	1 unit	3,676,351,284	5,315,109,240
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	526 Unit	526 Unit	1,924,923,816	3,069,923,816
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	48 unit	48 unit	14,512,537,594	13,133,229,092
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 paket	3 paket	2,625,092,365	3,863,963,943

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 paket	2 paket	9,705,842,560	9,002,567,997
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5 unit	5 unit	203,926,345	203,926,345
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	12 Paket	6,168,000	6,168,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	10%	10%	76,509,846,390	96,102,342,090
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.194 ibu hamil	14.194 ibu hamil	373,071,350	246,617,350
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.549 ibu bersalin	13.549 ibu bersalin	533,760,000	437,160,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.458 bayi	13.458 bayi	29,393,650	29,393,650
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52.943 balita	52.943 balita	24,189,850	24,189,850
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749.542 orang	749.542 orang	99,840,000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184.276 orang	184.276 orang	9,999,850	9,999,850
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	302.736 orang	302.736 orang	109,299,400	109,299,400

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.998 orang	11.998 orang	61,500,300	1,174,382,700
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	14.338 orang	14.338 orang	13,748,900	1,883,588,900
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18.782 orang	18.782 orang	68,955,250	269,755,250
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	209,065,640	6,576,729,040
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12,959,850	12,959,850
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	109,077,600	209,074,200
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	230,252,900	91,983,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	20,000,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	28,602,350	97,592,350
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 orang	10 orang	14,000,000	14,000,000
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen		783,124,400
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	265,115,750	434,395,750

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	12 dokumen	12 dokumen	72,624,044,850	82,914,678,250
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	48,987,350	48,987,350
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,027,336,950	244,212,550
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	24,819,200	41,270,800
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	30 Puskesmas	30 Puskesmas	379,510,950	39,999,950
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 dokumen	12 dokumen	95,265,950	65,025,950
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	90,387,500	21,397,500
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit	6,661,000	33,533,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	311.657 keluarga	311.657 keluarga		268,991,200
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK	80%	80%	25,688,700	25,688,700
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen	16,931,900	16,931,900
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen	8,756,800	8,756,800

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna	4 RS	4 RS	19,707,000	359,218,000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 RS	5 RS	19,707,000	19,707,000
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Puskesmas	30 Puskesmas		339,511,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan	1:690 rasio	1:690 rasio	11,937,549,600	13,512,299,600
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	75%	75%	13,300,000	13,300,000
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13,300,000	13,300,000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan	100%	100%	10,261,602,200	11,836,352,200
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7,872,200	7,872,200
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40 orang	40 orang	10,253,730,000	11,679,330,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	2 dokumen		149,150,000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	100%	100%	1,662,647,400	1,662,647,400
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 orang	10 orang	1,662,647,400	1,662,647,400
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	80%	80%	18,790,750	18,790,750
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	10 rekomendasi	10 rekomendasi	14,269,500	14,269,500
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen	14,269,500	14,269,500
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan Stiker Lisensi Laik Higiene	30%	30%	4,521,250	4,521,250

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,521,250	4,521,250
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga PURI	4.94%	4.94%	1,266,600,100	736,059,050
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	4 keg	4 keg	1,098,027,500	429,216,550
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen	1,098,027,500	429,216,550
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu	21 /jumlah penduduk	21 /jumlah penduduk	168,572,600	306,842,500
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	1491	1491	168,572,600	306,842,500
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri	10%	10%	485,399,800	485,399,800
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang tersedia Profil KKBPk	11 kecamatan	11 kecamatan	485,399,800	485,399,800
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	55,151,800	55,151,800
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	265,200,000	265,200,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah bulan laporan	12 Bulan	12 Bulan	165,048,000	165,048,000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)	70.39%	70.39%	6,290,232,337	6,514,485,787
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana	40%	40%	1,987,393,422	2,097,353,322
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi	10 Organisasi	10 Organisasi	34,494,100	144,454,000
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media KIE yang digunakan	4 Media	4 Media	150,000,000	150,000,000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	4 kegiatan	4 kegiatan	471,379,600	471,379,600
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	26 Balai Penyuluhan	26 Balai Penyuluhan	1,251,899,722	1,251,899,722
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah bulan pelaporan yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	79,620,000	79,620,000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga PKB/PLKB dan Kader IMP yang aktif	100%	100%	1,188,000,000	1,188,000,000
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	260 Organisasi	260 Organisasi	520,000,000	520,000,000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang difasilitasi	668 Orang	668 Orang	668,000,000	668,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes (Fasilitas Kesehatan) teregister yang difasilitasi	100%	100%	2,022,950,765	2,137,244,315
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang difasilitasi	59 Faskes	59 Faskes	49,499,900	49,499,900
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	120 Orang 1026 Orang	120 Orang 1026 Orang	530,929,350	530,929,350
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana KB yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 unit 0 unit	6 unit 0 unit	1,380,699,965	1,380,699,965
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pembinaan pelayanan KB yang dilaksanakan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	27,299,700	27,299,700
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20 Orang	20 Orang		114,293,550
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	150 Orang	150 Orang	34,521,850	34,521,850

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan berKB	100%	100%	1,091,888,150	1,091,888,150
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	67 Kampung KB	67 Kampung KB	1,047,499,800	1,047,499,800
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	12 Laporan	44,388,350	44,388,350
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	80%	80%	6,058,026,940	5,833,773,490
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Aktif	100%	100%	5,930,093,550	5,815,800,000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang dibeli	30 Paket	30 Paket	360,000,000	360,000,000
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang aktif	2514 Orang	2514 Orang	5,455,800,000	5,455,800,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok PIK R yang aktif	54 Kelompok	54 Kelompok	114,293,550	0
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif dalam Pembangunan Keluarga	100%	100%	127,933,390	17,973,490
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	127,933,390	17,973,490

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja

Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,79	0,800	101	Sangat Tinggi	BPS
1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72	72,47	101	Sangat Tinggi	BPS
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,60	104	Sangat Tinggi	DKP2KB
		Total Fertility Rate (TFR)	2,03	2,12	96	Sangat Tinggi	DKP2KB

Uraian penjelasan tabel :

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku. Angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebesar 72,47 tahun, angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 72 tahun. Angka Harapan Hidup Tahun 2023 naik dibandingkan AHH Tahun 2022 sebesar 71,99 tahun.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai yang didapatkan dari penghitungan survey kepuasan masyarakat. Berisi data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat terjadi peningkatan dari tahun 2022 sebesar 85,82 menjadi 87,96% di tahun 2023 artinya masyarakat semakin puas terhadap kinerja RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep. pengukuran survei kepuasan masyarakat itu dilakukan secara periodik setiap semester jadi dari periode ke-1 januari hingga bulan Juni periode kedua Juli hingga Desember untuk Angka yang diperoleh untuk tahun 2023 merupakan rata-rata dari penilaian di dua semester tersebut untuk cara penghitungannya dari survei ke pasar masyarakat terdiri dari 9 indikator yang tertuang dalam kuesioner di mana masing-masing indicator memiliki range penilaian masing-masing untuk nilai tertinggi dari penilaian terbaik untuk masing-masing indikator nilainya adalah 4 untuk nilai terendahnya adalah 1. Adapun hasil akumulasi IKM pada penilaian semester 1 (januari-juni adalah 88,60%) dan hasil akumulasi IKM pada penilaian semester 2 (juli-desember adalah 87,32%). Sehingga IKM pada tahun 2023 adalah rerata IKM pada semester 1 dan semester 2 yaitu $(88,60\%+87,32\%=87,96\%)$.

3. Total Fertility Rate (TFR)

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan nomor 0120/RC.03/B1/2024 perihal Permintaan Data untuk pengusulan kebutuhan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk diminta untuk

menyediakan data TFR, mCPR, dan unmet need tingkat kabupaten/kota tahun 2023.

Dalam penghitungan Indikator TFR dan ASFR 15-19 tahun tahun 2023 tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan catatan sebagai berikut:

1. Metode penghitungan menggunakan metode tidak langsung yaitu Metode Anak Kandung atau Own Children Method.
2. Data dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PK-23) tidak dapat secara mandiri digunakan untuk menghitung TFR dan ASFR 15-19 Tahun karena dua alasan :
 - Terdapat undercount yang cukup besar untuk kelompok usia 0-4 Tahun (nasional 26 persen; provinsi antara 12-75 persen)
 - Data PK-23 tidak dapat digunakan untuk menghitung UHH (Umur Harapan Hidup), karena jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak masih hidup yang dihasilkan sangat identik sehingga menghasilkan UHH yang jauh lebih tinggi dari UHH yang dipublikasikan BPS.
3. Agar data PK-23 dapat digunakan untuk menghitung TFR dan ASFR 15-19 Tahun, maka diperlukan adjustment yaitu :
 - Adjustment jumlah balita, anak dan wanita dengan menggunakan data dari Susenas 2023
 - Menggunakan umur harapan hidup yang telah dipublikasikan BPS Tahun 2023 untuk Indeks Pembangunan Manusia.
4. Secara umum, penghitungan TFR dan ASFR menggunakan pemutakhiran PK2023 dapat dihitung sampai tingkat kabupaten/kota (dengan metode yang sama seperti penghitungan TFR dan ASFR tingkat provinsi). Hanya saja, untuk beberapa kabupaten/kota yang perkiraan angka TFR terlalu tinggi atau rendah dari hasil perhitungan proyeksi BPS untuk tahun 2025 dan LF SP2020, estimasi TFR dan ASFR dilakukan dengan metode interpolasi data berdasarkan data proyeksi TFR tahun 2020 dan 2025 sesuai publikasi BPS. Provinsi dengan kabupaten/kota yang paling banyak dilakukan interpolasi adalah Provinsi Papua, dimana hanya tujuh

kabupaten/kota yang dapat dihitung menggunakan Pemutakhiran PK2023, sisanya diestimasi dengan metode interpolasi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,789	0,800	101	0,79	0,8	101
1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,78	71,99	100	72	72,47	101
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87,28	103	85	88,60	104
		Total Fertility Rate (TFR)	2,13	2,12	100	2,03	2,12	96

Uraian penjelasan tabel :

1. Angka Harapan Hidup

Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2023 (101%) mengalami kenaikan 1% dibandingkan tahun 2022 (100%). Kenaikan tersebut disebabkan turunnya angka kematian ibu sebesar 2,22 per 100.000 kelahiran hidup yaitu 92,99 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 90,77 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yaitu sebesar 104% mengalami kenaikan sebesar 1 % dibandingkan tahun 2022 sebesar 103%. Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut menunjukkan kepuasan terhadap kinerja RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep dan telah memenuhi dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

3. Total Fertility Rate (TFR)

Capaian Total Fertility Rate Kabupaten Sumenep Tahun 2023 (96%) mengalami penurunan 4 % dibandingkan tahun 2022 (100%). Walaupun mengalami penurunan capaian tetapi masih berada diatas target yang ditetapkan, dari hasil pendataan keluarga yang dilakukan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2023, diperoleh angka TFR sebesar 2,12 dari target yang ditetapkan sebesar 2,03. Hal ini berarti bahwa wanita usia subur (usia 15 - 49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 orang anak selama masa usia suburnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8	0,792	101,01 %
1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,47	72,66	99,74 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60	85	104,24 %
		Total Fertility Rate (TFR)	2,12	1,73	122,54 %

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Kemajuan capaian strategis mengalami progres positif disemua indikator kinerja baik indikator kinerja tujuan maupun indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Indeks Kesehatan mengalami kenaikan dengan Tingkat kemajuan 101,01 %, Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan dengan Tingkat kemajuan 99,74 %, Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan dengan Tingkat kemajuan 104,24 %, Total Fertility Rate (TFR) mengalami kenaikan dengan Tingkat kemajuan 122,54 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8		
1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,47	73,93	98%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60		
		Total Fertility Rate (TFR)	2,12	2,14	99%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kesehatan	0,79	0,800	101%		
1	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup (AHH)	72	72,47	101%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	91,3 /100.000 KH	90,8/100.000 KH	99.45%	Mobilitas masyarakat Kabupaten Sumenep yang tinggi, hamil di perantauan dan melahirkan di kampung halaman (Kab. Sumenep)	Memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk pemeriksaan kehamilan sedini mungkin atau usia kehamilan di bawah 12 minggu sehingga K1 Murni tercapai dengan demikian K4 pun tercapai
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	1 unit	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	526 Unit	526 unit	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 paket	3 paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 paket	2 paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						yang telah disusun	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5 unit	0	0.00%	Karena Puskesmas pagerungan belum keluar ijin operasional sehingga statusnya masih pustu dan pemeliharaan dikelola Puskesmas Sapeken	Menyelesaikan ijin operasional
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	12 Paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	10%	96.67%	966.67%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.194 ibu hamil	13.156 ibu hamil	92.69%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.549 ibu bersalin	13.475 ibu bersalin	99.45%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.458 bayi	13.026 bayi	96.79%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52.943 balita	50.670 balita	95.71%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749.542 orang	668.401 orang	89.17%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184.276 orang	167.154 orang	90.71%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	302.736 orang	252.344 orang	83.35%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.998 orang	11.698 orang	97.50%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	14.338 orang	14.338 orang	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18.782 orang	21.289 orang	81.44%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 orang	38 orang	380.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	30 Puskesmas	30 Puskesmas	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	0	0.00%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	311.657 keluarga	23.936 keluarga	7.68%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK	80%	80%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						yang telah disusun	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna	4 RS	5 RS	125.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 RS	5 RS	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Puskesmas	30 Puskesmas	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan	1:690 rasio	1:408 rasio	169.12%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	75%	60%	80.00%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan	100%	100%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40 orang	40 orang	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	100%	60%	60.00%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 orang	10 Orang	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	80%	82.00%	102.50%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	10 rekomendasi	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan Stiker Lisensi Laik Higiene	30%	30.0%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga PURI	4.94%	4.94%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	4 keg	4 Kegiatan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu	21 /jumlah penduduk	21 /jumlah penduduk	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	1491	1492	100.07%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
2	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,60	104%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Ibu / 1000 KH	91,3 /100.000 KH	90,8/100.000 KH	99.45%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar	60.00%	56.00%	93.33%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	48 unit	48 unit	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
3	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Total Fertility Rate (TFR)	2,03	2,12	96%		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri	10%	11.39%	113.90%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang tersedia Profil KKBPK	11 kecamatan	11 kecamatan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah bulan laporan	12 Bulan	12 bulan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)	70.39%	59.44%	84.44%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana	40%	40%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi	10 Organisasi	10 Organisasi	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media KIE yang digunakan	4 Media	4 Media	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	26 Balai Penyuluhan	26 Balai Penyuluhan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah bulan pelaporan yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga PKB/PLKB dan Kader IMP yang aktif	100%	100.00%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	260 Organisasi	260 Organisasi	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang difasilitasi	668 Orang	668 orang	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						perencanaan yang telah disusun	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes (Fasilitas Kesehatan) teregister yang difasilitasi	100%	44.66%	44.66%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang difasilitasi	59 Faskes	34 Faskes	57.63%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	120 Orang 1026 Orang	120 Orang 1035 Orang	100,00 % 96,39 %	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana KB yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 unit 0 unit	6 unit 0 unit	100,00 % 0,00 %	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pembinaan pelayanan KB yang dilaksanakan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20 Orang	20 orang	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	150 Orang	150 orang	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi masyarakat yang aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan berKB	100%	100.00%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	67 Kampung KB	67 Kampung KB	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						yang telah disusun	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	12 laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	80%	119.66%	149.58%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Aktif	100%	80.00%	80.00%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang dibeli	30 Paket	30 Paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang aktif	2514 Orang	2.466 Orang	98.09%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok PIK R yang aktif	54 Kelompok	45 Kelompok	83.33%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif dalam Pembangunan Keluarga	100%	100.00%	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
4	MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	91,3%	95%	100%		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	91.30%	87.00%	95.29%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17 dokumen	17 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						yang telah disusun	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	10 laporan	10 laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1367 orang/bulan	1303 orang/bulan	97.73%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 Laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12 laporan	12 laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	1 jenis	1 jenis	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	171 paket	171 paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	7 jenis	7 jenis	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 Paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	36 paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	170 Dokumen	170 Dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	560 Laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 dokumen	10.000 dokumen	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4800 Laporan	4800 Laporan	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	47 unit	58 unit	123.40%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 unit	8 unit	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	46 unit	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD	31 faskes	31 faskes	100.00%	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batuan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	80.01%	80.01%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pragaan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	85.42%	85.42%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bluto)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	90.34%	90.34%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalianget)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	88.88%	88.88%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Talango)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	87.25%	87.25%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandian)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	91.30%	91.30%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rubaru)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	95.00%	95.00%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Legung)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	96.88%	96.88%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dasuk)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	94.72%	94.72%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manding)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	91.76%	91.76%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Moncek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	89.30%	89.30%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lenteng)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	82.82%	82.82%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batang-Batang)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	89.23%	89.23%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Saronggi)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	72.05%	72.05%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pamolokan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	97.81%	97.81%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dungkek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	81.89%	81.89%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambunten)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	83.92%	83.92%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasongsongan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	80.79%	80.79%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Putih)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	86.28%	86.28%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gapura)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	89.92%	89.92%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Guluk-Guluk)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	91.88%	91.88%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ganding)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	80.32%	80.32%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Raas)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	75.58%	75.58%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Giligenting)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	64.57%	64.57%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nonggunong)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	77.20%	77.20%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayam)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	65.03%	65.03%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Arjasa)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	85.61%	85.61%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kangayan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	91.22%	91.22%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sapeken)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	71.94%	71.94%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Masalembu)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	62.97%	62.97%	Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Menyusun Kegiatan secara efektif dan efisien

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 maka terdapat 3 indikator dari 1 sasaran yang telah ditetapkan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi Bupati Sumenep. Dalam analisis dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rata – rata Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2023 sebesar 98%, keberhasilan Program dan kegiatan tidak terlepas dari kualitas perencanaan yang baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kesehatan	101%				
1	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup (AHH)	101%				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	99.45%	Menunjang
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	100.00%	Menunjang
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	0.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	966.67%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92.69%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99.45%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96.79%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95.71%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89.17%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90.71%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83.35%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97.50%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	81.44%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	380.00%	Menunjang
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	100.00%	Menunjang
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	100.00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.00%	Menunjang
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	100.00%	Menunjang
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.00%	Menunjang
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100.00%	Menunjang
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	100.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Pemberian Obat Massal)		
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.00%	Menunjang
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0.00%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	7.68%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.00%	Menunjang
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna	125.00%	Menunjang
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100.00%	Menunjang
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0.00%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan	169.12%	Menunjang
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	80.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00%	Menunjang
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan	100.00%	Menunjang
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00%	Menunjang
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100.00%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00%	Menunjang
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	60.00%	Menunjang
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100.00%	Menunjang
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	102.50%	Menunjang
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	100.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.00%	Menunjang
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan Stiker Lisensi Laik Higiene	100.00%	Menunjang
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100.00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga PURI	100.00%	Menunjang
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100.00%	Menunjang
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.00%	Menunjang
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu	100.00%	Menunjang
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	100.07%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
2	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	104%				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Ibu / 1000 KH	99.45%	Menunjang
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar	93.33%	Menunjang
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100.00%	Menunjang
3	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Total Fertility Rate (TFR)	96%				
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri	113.90%	Menunjang
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang tersedia Profil KKBPK	100.00%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100.00%	Menunjang
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100.00%	Menunjang
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah bulan laporan	100.00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)	84.44%	Menunjang
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	100.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Advokasi Program KKBPB kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi	100.00%	Menunjang
				Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media KIE yang digunakan	100.00%	Menunjang
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPB melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	100.00%	Menunjang
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	100.00%	Menunjang
				Pengendalian Program KKBPB	Jumlah bulan pelaporan yang dihasilkan	100.00%	Menunjang
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga PKB/ PLKB dan Kader IMP yang aktif	100.00%	Menunjang
				Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100.00%	Menunjang
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang difasilitasi	100.00%	Menunjang
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes (Fasilitas Kesehatan) teregister yang difasilitasi	44.66%	Menunjang
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang difasilitasi	57.63%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00 % 96,39 %	Menunjang
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana KB yang disediakan Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00 % 0,00 %	Menunjang
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pembinaan pelayanan KB yang dilaksanakan	100.00%	Menunjang
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100.00%	Menunjang
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100.00%	Menunjang
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan berKB	100.00%	Menunjang
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	100.00%	Menunjang
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	100.00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	149.58%	Menunjang
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Aktif	80.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang dibeli	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang aktif	98.09%	Menunjang
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok PIK R yang aktif	83.33%	Menunjang
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif dalam Pembangunan Keluarga	100.00%	Menunjang
				Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	100.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
4	MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95.29%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100.00%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100.00%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97.73%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran yang tersusun	100.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	100.00%	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	Menunjang
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	100.00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	123.40%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	100.00%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00%	Menunjang
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD	100.00%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batuan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80.01%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pragaan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.42%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bluto)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	90.34%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalianget)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	88.88%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Talango)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p>	87.25%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandian)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.30%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rubaru)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	95.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Legung)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	96.88%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dasuk)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	94.72%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manding)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.76%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Moncek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.30%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lenteng)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82.82%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batang-Batang)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.23%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Saronggi)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	72.05%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pamolokan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	97.81%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dungkek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81.89%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambunten)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83.92%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasongsongan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80.79%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Putih)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	86.28%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gapura)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.92%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Guluk-Guluk)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.88%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ganding)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80.32%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Raas)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	75.58%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Giligenting)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	64.57%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nonggunong)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77.20%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayam)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	65.03%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Arjasa)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.61%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kangayan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.22%	Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sapeken)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	71.94%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Masalembu)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	62.97%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 maka terdapat 3 indikator dari 1 sasaran yang telah ditetapkan. Indikator yang telah ditetapkan ditunjang beberapa program dan kegiatan :

1. Angka Harapan Hidup (AHH), indikator ini ditunjang oleh Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat didukung dengan 41 Kegiatan, Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan didukung dengan 8 Kegiatan, Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman didukung dengan 4 Kegiatan, Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan didukung dengan 4 Kegiatan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat, indikator ini ditunjang oleh Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan didukung dengan 2 Kegiatan.
3. Total Fertility Rate (TFR) , indikator ini ditunjang oleh Program pengendalian penduduk didukung dengan 4 Kegiatan, Program pembinaan keluarga berencana (KB) didukung dengan 19 Kegiatan, Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) didukung dengan 6 Kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	217,541,916,396	185,547,306,712	85.29%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,311,000	49,333,600	87.61%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,249,000	25,826,400	91.42%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,392,950	3,127,500	92.18%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,025,650	2,137,750	70.65%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,042,250	1,800,500	59.18%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,018,550	1,913,500	63.39%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,214,700	4,606,250	88.33%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,367,900	9,921,700	95.70%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91,287,781,816	80,963,146,644	88.69%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91,237,782,016	80,913,348,344	88.68%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,059,900	5,043,500	99.68%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44,939,900	44,754,800	99.59%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76,873,050	76,608,000	99.66%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76,873,050	76,608,000	99.66%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,459,261,606	1,439,211,303	98.63%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,119,000	10,950,000	98.48%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,231,900	24,229,000	99.99%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,041,803,546	1,027,104,149	98.59%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,323,600	28,165,550	99.44%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38,113,000	33,650,000	88.29%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,676,000	265,655,155	99.99%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49,994,560	49,457,449	98.93%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402,785,372	344,191,180	85.45%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402,785,372	344,191,180	85.45%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209,395,147	209,340,891	99.97%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137,659,200	137,650,891	99.99%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,460,000	30,430,000	99.90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41,275,947	41,260,000	99.96%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	124,049,508,405	102,465,475,094	82.60%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batuan)	1,850,642,436	1,480,734,671	80.01%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pragaan)	6,991,337,758	5,972,328,575	85.42%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bluto)	4,766,037,801	4,305,758,928	90.34%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalianget)	3,722,059,155	3,308,180,536	88.88%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Talango)	3,369,218,315	2,939,657,362	87.25%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandian)	1,913,078,602	1,746,670,176	91.30%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rubaru)	3,575,305,523	3,396,673,333	95.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Legung)	1,922,098,210	1,862,075,163	96.88%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dasuk)	2,870,103,242	2,718,447,118	94.72%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manding)	2,925,886,221	2,684,860,421	91.76%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Moncek)	2,702,954,522	2,413,788,470	89.30%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lenteng)	3,357,333,621	2,780,606,843	82.82%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batang-Batang)	3,884,638,451	3,466,341,051	89.23%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Saronggi)	4,982,366,535	3,589,707,889	72.05%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pamolokan)	2,440,671,058	2,387,276,978	97.81%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dungkek)	3,595,055,709	2,943,837,427	81.89%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambunten)	4,959,465,401	4,162,122,437	83.92%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasongsongan)	5,184,314,508	4,188,473,961	80.79%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Putih)	3,990,463,881	3,442,836,535	86.28%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gapura)	3,448,234,148	3,100,481,134	89.92%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Guluk-Guluk)	4,931,161,390	4,530,969,651	91.88%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ganding)	3,936,324,798	3,161,613,887	80.32%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Raas)	6,531,770,442	4,936,991,154	75.58%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Giligenting)	3,994,003,814	2,579,050,052	64.57%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nonggunong)	2,033,969,516	1,570,238,001	77.20%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayam)	6,401,543,605	4,162,771,627	65.03%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Arjasa)	9,181,428,895	7,859,864,887	85.61%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kangayan)	2,943,638,445	2,685,054,129	91.22%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sapeken)	8,425,422,164	6,061,129,312	71.94%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Masalembu)	3,218,980,239	2,026,933,386	62.97%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	131,082,137,223	123,540,344,844	94.25%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	34,594,888,433	32,591,840,502	94.210%
	Pengembangan Rumah Sakit	5,315,109,240	4,953,950,661	93.21%
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,069,923,816	3,034,315,000	98.84%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,133,229,092	12,677,380,626	96.53%
	Pengadaan Obat, Vaksin	3,863,963,943	3,763,946,366	97.41%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	9,002,567,997	8,156,330,849	90.60%
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	203,926,345	0	0.00%
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,168,000	5,917,000	95.93%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96,102,342,090	90,691,530,067	94.37%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	246,617,350	168,119,125	68.17%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	437,160,000	0	0.00%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	29,393,650	28,205,900	95.96%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24,189,850	22,357,500	92.43%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0.00%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9,999,850	9,805,300	98.05%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	109,299,400	103,943,250	95.10%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1,174,382,700	887,511,423	75.57%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1,883,588,900	13,445,800	0.71%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	269,755,250	264,560,000	98.07%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6,576,729,040	6,250,046,650	95.03%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12,959,850	12,676,000	97.81%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	209,074,200	189,963,341	90.86%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	91,983,000	88,677,400	96.41%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20,000,000	17,990,000	89.95%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97,592,350	77,889,200	79.81%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14,000,000	12,258,500	87.56%
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	783,124,400	565,978,603	72.27%
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	434,395,750	331,617,200	76.34%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	82,914,678,250	81,135,420,900	97.85%
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	48,987,350	47,138,000	96.22%
	Operasional Pelayanan Puskesmas	244,212,550	53,640,750	21.96%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	41,270,800	23,917,050	57.95%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	39,999,950	21,160,000	52.90%
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	65,025,950	62,780,000	96.55%
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	21,397,500	16,395,375	76.62%
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	33,533,000	30,711,000	91.58%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	268,991,200	255,321,800	94.92%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	25,688,700	23,910,275	93.08%
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	16,931,900	15,948,125	94.19%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8,756,800	7,962,150	90.93%
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	359,218,000	233,064,000	64.88%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	19,707,000	10,894,000	55.28%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	339,511,000	222,170,000	65.44%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13,512,299,600	12,200,241,900	90.29%
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	13,300,000	11,904,900	89.51%
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	13,300,000	11,904,900	89.51%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11,836,352,200	10,729,773,000	90.65%
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7,872,200	3,923,000	49.83%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	11,679,330,000	10,632,300,000	91.04%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	149,150,000	93,550,000	62.72%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,662,647,400	1,458,564,000	87.73%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,662,647,400	1,458,564,000	87.73%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	18,790,750	18,180,000	96.75%
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	14,269,500	14,010,000	98.18%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	14,269,500	14,010,000	98.18%
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4,521,250	4,170,000	92.23%
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4,521,250	4,170,000	92.23%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	736,059,050	679,919,000	92.37%
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	429,216,550	394,389,000	91.89%
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	429,216,550	394,389,000	91.89%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	306,842,500	285,530,000	93.05%
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	306,842,500	285,530,000	93.05%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	485,399,800	270,441,171	55.72%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	485,399,800	270,441,171	55.72%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	55,151,800	48,335,500	87.64%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	265,200,000	160,000,000	60.33%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	165,048,000	62,105,671	37.63%
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6,514,485,787	5,706,626,240	87.60%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2,097,353,322	1,759,260,490	83.88%
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	144,454,000	115,966,500	80.28%
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000	77,883,950	51.92%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	471,379,600	357,510,000	75.84%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1,251,899,722	1,143,440,040	91.34%
	Pengendalian Program KKBPK	79,620,000	64,460,000	80.96%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,188,000,000	1,125,200,000	94.71%
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	520,000,000	492,200,000	94.65%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	668,000,000	633,000,000	94.76%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2,137,244,315	1,930,348,375	90.32%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49,499,900	26,105,316	52.74%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	530,929,350	425,473,000	80.14%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,380,699,965	1,326,933,859	96.11%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27,299,700	16,780,000	61.47%
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	114,293,550	105,565,200	92.36%
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	34,521,850	29,491,000	85.43%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1,091,888,150	891,817,375	81.68%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1,047,499,800	848,365,625	80.99%
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	44,388,350	43,451,750	97.89%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5,833,773,490	4,953,418,334	84.91%
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5,815,800,000	4,943,670,000	85.00%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360,000,000	352,440,000	97.90%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5,455,800,000	4,591,230,000	84.15%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0	0	0.00%
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	17,973,490	9,748,334	54.24%
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17,973,490	9,748,334	54.24%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAI AN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAI AN	
	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kesehatan	0,79	0,800	101%	375,724,862, 096	332,916,4 78,201	88.61%	113.99%
1	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup (AHH)	72	72,47	101%	132,216,057, 531	123,761,3 05,118	93.61%	107.90%
2	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,60	104%	13,133,229,0 92	12,677,38 0,626	96.53%	107.74%
3	TERJAMINNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Total Fertility Rate (TFR)	2,03	2,12	96%	12,833,659,0 77	10,930,48 5,745	85.17%	112.72%

Uraian penjelasan tabel :

Efisiensi dilakukan sesuai kebutuhan dan penyesuaian harga. Terjadinya efisiensi Sumber Daya tidak menyebabkan efisiensi Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan efisien yg ada, Tujuan dan Sasaran tetap dicapai dengan target sebagaimana yg direncanakan. Kategori/interpretasi capaian sangat tinggi yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	91,3 /100.000 KH	90,8/100.000 KH	99.45%	131,082,137,223	123,540,344,844	94.25%	105.52%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar	60.00%	56.00%	93.33%	34,594,888,433	32,591,840,502	94.210%	99.07%
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	1 unit	100.00%	5,315,109,240	4,953,950,661	93.21%	107.29%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	48 unit	48 unit	100.00%	13,133,229,092	12,677,380,626	96.53%	103.60%
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	526 Unit	526 unit	100.00%	3,069,923,816	3,034,315,000	98.84%	101.17%
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 paket	3 paket	100.00%	3,863,963,943	3,763,946,366	97.41%	102.66%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 paket	2 paket	100.00%	9,002,567,997	8,156,330,849	90.60%	110.38%
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5 unit	0	0.00%	203,926,345	0	0.00%	0.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	12 Paket	100.00%	6,168,000	5,917,000	95.93%	104.24%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	10%	96.67%	966.67%	96,102,342,090	90,691,530,067	94.37%	1024.34%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.194 ibu hamil	13.156 ibu hamil	92.69%	246,617,350	168,119,125	68.17%	135.96%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.549 ibu bersalin	13.475 ibu bersalin	99.45%	437,160,000	0	0.00%	0.00%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.458 bayi	13.026 bayi	96.79%	29,393,650	28,205,900	95.96%	100.87%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52.943 balita	50.670 balita	95.71%	24,189,850	22,357,500	92.43%	103.55%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749.542 orang	668.401 orang	89.17%				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184.276 orang	167.154 orang	90.71%	9,999,850	9,805,300	98.05%	92.51%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	302.736 orang	252.344 orang	83.35%	109,299,400	103,943,250	95.10%	87.65%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.998 orang	11.698 orang	97.50%	1,174,382,700	887,511,423	75.57%	129.01%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	14.338 orang	14.338 orang	100.00%	1,883,588,900	13,445,800	0.71%	14008.75%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18.782 orang	21.289 orang	81.44%	269,755,250	264,560,000	98.07%	83.04%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	6,576,729,040	6,250,046,650	95.03%	105.23%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	12,959,850	12,676,000	97.81%	102.24%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	209,074,200	189,963,341	90.86%	110.06%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	91,983,000	88,677,400	96.41%	103.73%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	20,000,000	17,990,000	89.95%	111.17%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	97,592,350	77,889,200	79.81%	125.30%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 orang	38 orang	380.00%	14,000,000	12,258,500	87.56%	433.98%
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	783,124,400	565,978,603	72.27%	138.37%
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	434,395,750	331,617,200	76.34%	130.99%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	82,914,678,250	81,135,420,900	97.85%	102.19%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	48,987,350	47,138,000	96.22%	103.92%
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	244,212,550	53,640,750	21.96%	455.27%
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	41,270,800	23,917,050	57.95%	172.56%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	30 Puskesmas	30 Puskesmas	100.00%	39,999,950	21,160,000	52.90%	189.04%
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	65,025,950	62,780,000	96.55%	103.58%
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	21,397,500	16,395,375	76.62%	65.25%
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	0	0.00%	33,533,000	30,711,000	91.58%	0.00%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	311.657 keluarga	23.936 keluarga	7.68%	268,991,200	255,321,800	94.92%	8.09%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK	80%	80%	100.00%	25,688,700	23,910,275	93.08%	107.44%
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	16,931,900	15,948,125	94.19%	106.17%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	12 Dokumen	100.00%	8,756,800	7,962,150	90.93%	109.98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna	4 RS	5 RS	125.00%	359,218,000	233,064,000	64.88%	192.66%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 RS	5 RS	100.00%	19,707,000	10,894,000	55.28%	180.90%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Puskesmas	30 Puskesmas	100.00%	339,511,000	222,170,000	65.44%	0.00%
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan	1:690 rasio	1:408 rasio	169.12%	13,512,299,600	12,200,241,900	90.29%	187.31%
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	75%	60%	80.00%	13,300,000	11,904,900	89.51%	89.37%
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	13,300,000	11,904,900	89.51%	111.72%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan	100%	100%	100.00%	11,836,352,200	10,729,773,000	90.65%	110.31%
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	7,872,200	3,923,000	49.83%	200.67%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40 orang	40 orang	100.00%	11,679,330,000	10,632,300,000	91.04%	109.85%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	149,150,000	93,550,000	62.72%	159.43%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	100%	60%	60.00%	1,662,647,400	1,458,564,000	87.73%	68.40%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 orang	10 Orang	100.00%	1,662,647,400	1,458,564,000	87.73%	113.99%
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	80%	82.00%	102.50%	18,790,750	18,180,000	96.75%	105.94%
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	10 rekomendasi	12 Dokumen	100.00%	14,269,500	14,010,000	98.18%	101.85%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	14,269,500	14,010,000	98.18%	101.85%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan Stiker Lisensi Laik Higiene	30%	30.0%	100.00%	4,521,250	4,170,000	92.23%	108.42%
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokum en	12 Dokum en	100.00%	4,521,250	4,170,000	92.23%	108.42%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga PURI	4.94%	4.94%	100.00%	736,059,050	679,919,000	92.37%	108.26%
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	4 keg	4 Kegiata n	100.00%	429,216,550	394,389,000	91.89%	108.83%
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokum en	8 Dokum en	100.00%	429,216,550	394,389,000	91.89%	108.83%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu	21 /jumlah pendud uk	21 /jumlah pendud uk	100.00%	306,842,500	285,530,000	93.05%	107.46%
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	1491	1492	100.07%	306,842,500	285,530,000	93.05%	107.54%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri	10%	11.39%	113.90%	485,399,800	270,441,171	55.72%	204.43%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang tersedia Profil KKBPK	11 kecama tan	11 kecama tan	100.00%	485,399,800	270,441,171	55.72%	179.48%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 laporan	100.00%	55,151,800	48,335,500	87.64%	114.10%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 laporan	100.00%	265,200,000	160,000,000	60.33%	165.75%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah bulan laporan	12 Bulan	12 bulan	100.00%	165,048,000	62,105,671	37.63%	265.75%
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)	70.39%	59.44%	84.44%	6,514,485,787	5,706,626,240	87.60%	96.40%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana	40%	40%	100.00%	2,097,353,322	1,759,260,490	83.88%	119.22%
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi	10 Organisasi	10 Organisasi	100.00%	144,454,000	115,966,500	80.28%	124.57%
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media KIE yang digunakan	4 Media	4 Media	100.00%	150,000,000	77,883,950	51.92%	192.59%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kegiatan yang dilakukan	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00%	471,379,600	357,510,000	75.84%	131.85%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	26 Balai Penyuluhan	26 Balai Penyuluhan	100.00%	1,251,899,722	1,143,440,040	91.34%	109.49%
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah bulan pelaporan yang dihasilkan	12 bulan	12 bulan	100.00%	79,620,000	64,460,000	80.96%	123.52%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga PKB/PLKB dan Kader IMP yang aktif	100%	100.00%	100.00%	1,188,000,000	1,125,200,000	94.71%	105.58%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	260 Organisasi	260 Organisasi	100.00%	520,000,000	492,200,000	94.65%	105.65%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang difasilitasi	668 Orang	668 orang	100.00%	668,000,000	633,000,000	94.76%	105.53%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes (Fasilitas Kesehatan) teregister yang difasilitasi	100%	44.66%	44.66%	2,137,244,315	1,930,348,375	90.32%	49.45%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang difasilitasi	59 Faskes	34 Faskes	57.63%	49,499,900	26,105,316	52.74%	109.27%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	120 Orang	120 Orang	100,00 %	530,929,350	425,473,000	80.14%	125%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana KB yang disediakan	6 unit	6 unit	100,00 %	1,380,699,965	1,326,933,859	96.11%	104%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pembinaan pelayanan KB yang dilaksanakan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100.00%	27,299,700	16,780,000	61.47%	162.69%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20 Orang	20 orang	100.00%	114,293,550	105,565,200	92.36%	108.27%
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	150 Orang	150 orang	100.00%	34,521,850	29,491,000	85.43%	117.06%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan berKB	100%	100.00 %	100.00%	1,091,888,150	891,817,375	81.68%	122.43%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	67 Kampu ng KB	67 Kampu ng KB	100.00%	1,047,499,800	848,365,625	80.99%	123.47%
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Lapora n	12 laporan	100.00%	44,388,350	43,451,750	97.89%	102.16%
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	80%	119.66 %	149.58%	5,833,773,490	4,953,418,334	84.91%	176.16%
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Aktif	100%	80.00%	80.00%	5,815,800,000	4,943,670,000	85.00%	94.11%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang dibeli	30 Paket	30 Paket	100.00%	360,000,000	352,440,000	97.90%	102.15%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang aktif	2514 Orang	2.466 Orang	98.09%	5,455,800,000	4,591,230,000	84.15%	116.56%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok PIK R yang aktif	54 Kelompok	45 Kelompok	83.33%	0	0	0.00%	0.00%
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Aktif dalam Pembangunan Keluarga	100%	100.00%	100.00%	17,973,490	9,748,334	54.24%	184.37%
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100.00%	17,973,490	9,748,334	54.24%	184.37%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	91.30%	87.00%	95.29%	217,541,916,396	185,547,306,712	85.29%	111.72%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	56,311,000	49,333,600	87.61%	114.14%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17 dokumen	17 dokumen	100.00%	28,249,000	25,826,400	91.42%	109.38%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	3,392,950	3,127,500	92.18%	108.49%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	3,025,650	2,137,750	70.65%	141.53%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	3,042,250	1,800,500	59.18%	168.97%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	3,018,550	1,913,500	63.39%	157.75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	100.00%	5,214,700	4,606,250	88.33%	113.21%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100.00%	10,367,900	9,921,700	95.70%	104.50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	10 laporan	10 laporan	100.00%	91,287,781,816	80,963,146,644	88.69%	112.75%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1367 orang/bulan	1303 orang/bulan	97.73%	91,237,782,016	80,913,348,344	88.68%	110.20%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 Laporan	100.00%	5,059,900	5,043,500	99.68%	100.33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12 laporan	12 laporan	100.00%	44,939,900	44,754,800	99.59%	100.41%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	1 jenis	1 jenis	100.00%	76,873,050	76,608,000	99.66%	100.35%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	171 paket	171 paket	100.00%	76,873,050	76,608,000	99.66%	100.35%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	7 jenis	7 jenis	100.00%	1,459,261,606	1,439,211,303	98.63%	101.39%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 Paket	100.00%	11,119,000	10,950,000	98.48%	101.54%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket	100.00%	24,231,900	24,229,000	99.99%	100.01%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	36 paket	100.00%	1,041,803,546	1,027,104,149	98.59%	101.43%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	100.00%	28,323,600	28,165,550	99.44%	100.56%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	170 Dokumen	170 Dokumen	100.00%	38,113,000	33,650,000	88.29%	113.26%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	560 Laporan	100.00%	265,676,000	265,655,155	99.99%	100.01%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 dokumen	10.000 dokumen	100.00%	49,994,560	49,457,449	98.93%	101.09%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	402,785,372	344,191,180	85.45%	117.02%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4800 Laporan	4800 Laporan	100.00%	402,785,372	344,191,180	85.45%	117.02%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	47 unit	58 unit	123.40%	209,395,147	209,340,891	99.97%	123.44%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	8 unit	8 unit	100.00%	137,659,200	137,650,891	99.99%	100.01%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	46 unit	100.00%	30,460,000	30,430,000	99.90%	100.10%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100.00%	41,275,947	41,260,000	99.96%	100.04%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD	31 faskes	31 faskes	100.00%	124,049,508,405	102,465,475,094	82.60%	121.06%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batuan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	 100 % % %	 80.01% %	 80.01% %	 1,850,642,436 %	 1,480,734,671 %	 80.01% %	 100.00% %
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pragaan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	 100 % % %	 85.42% %	 85.42% %	 6,991,337,758 %	 5,972,328,575 %	 85.42% %	 100.00% %

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bluto)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhi 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % % %	90.34% % %	90.34% % %	4,766,037,80 1	4,305,758, 928	90.34%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalianget)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhi 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % % %	88.88% % %	88.88% % %	3,722,059,15 5	3,308,180, 536	88.88%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Talango)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	87.25%	87.25%	3,369,218,31 5	2,939,657, 362	87.25%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandian)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	91.30%	91.30%	1,913,078,60 2	1,746,670, 176	91.30%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rubaru)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	95.00%	95.00%	3,575,305,52 3	3,396,673, 333	95.00%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Legung)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	96.88%	96.88%	1,922,098,21 0	1,862,075, 163	96.88%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dasuk)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	94.72%	94.72%	2,870,103,24 2	2,718,447, 118	94.72%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manding)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	91.76%	91.76%	2,925,886,22 1	2,684,860, 421	91.76%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Moncek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	89.30%	89.30%	2,702,954,52 2	2,413,788, 470	89.30%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lenteng)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	82.82%	82.82%	3,357,333,62 1	2,780,606, 843	82.82%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batang-Batang)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	89.23%	89.23%	3,884,638,45 1	3,466,341, 051	89.23%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Saronggi)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	72.05%	72.05%	4,982,366,53 5	3,589,707, 889	72.05%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pamolokan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	97.81%	97.81%	2,440,671,058	2,387,276,978	97.81%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dungkek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	81.89%	81.89%	3,595,055,709	2,943,837,427	81.89%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambunten)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	83.92%	83.92%	4,959,465,40 1	4,162,122, 437	83.92%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasongsongan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	80.79%	80.79%	5,184,314,50 8	4,188,473, 961	80.79%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Putih)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	86.28%	86.28%	3,990,463,881	3,442,836,535	86.28%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gapura)	<p>BOR (Bed Occupancy Ratio)</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD</p> <p>Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	100 %	89.92%	89.92%	3,448,234,148	3,100,481,134	89.92%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Guluk-Guluk)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	91.88%	91.88%	4,931,161,390	4,530,969,651	91.88%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ganding)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	80.32%	80.32%	3,936,324,798	3,161,613,887	80.32%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Raas)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	75.58%	75.58%	6,531,770,44 2	4,936,991, 154	75.58%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Giligenting)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	64.57%	64.57%	3,994,003,81 4	2,579,050, 052	64.57%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nonggunong)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	77.20%	77.20%	2,033,969,516	1,570,238,001	77.20%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayam)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	65.03%	65.03%	6,401,543,605	4,162,771,627	65.03%	100.00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGE T	REALI SASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Arjasa)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	85.61%	85.61%	9,181,428,895	7,859,864,887	85.61%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kangayan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	91.22%	91.22%	2,943,638,445	2,685,054,129	91.22%	100.00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sapeken)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	71.94%	71.94%	8,425,422,164	6,061,129,312	71.94%	100.00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Masalembu)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	62.97%	62.97%	3,218,980,239	2,026,933,386	62.97%	100.00%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kategori/ interpretasi capaian sangat tinggi yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator Persentase Kampung KB Mandiri sebesar 204,43%. Hal

ini terjadi karena kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tersebut secara kuantitas mengalami peningkatan yang signifikan.

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1.	Menuangkan kendala, solusi dan strategis secara detail terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi dalam Kertas Kerja Pengukuran Kinerja dan Berita Acara Evaluasi Internal setiap triwulannya	Kendala, solusi dan strategis secara detail terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi telah tertuang dalam kertas kerja pengukuran kinerja dan berita acara evaluasi internal setiap triwulannya.
2.	Menguraikan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi adanya efisiensi belanja	Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya efisiensi belanja telah tertuang didalam laporan Tepra.
3.	Menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.	Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah tertuang dalam kertas kerja pengukuran kinerja.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101% (Kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,33% (Kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Program terdiri dari 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 117% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 375.724.862.096,14 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 332.916.478.201 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 88,61 dan nilai efisiensi anggaran sebesar 113,99%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep, Februari 2023

Pt. KERALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP



Drs. AUGUSTINO SULASNO, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 196608081986031005



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
JL. Dr. CIPTO 33 TELPON (0328) 662122



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. dr. CIPTO No. 33 TELPON (0328) 662122

EMAIL : dinkessumenep@gmail.com

SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 188/ 472 /KEP/435.102.1/2022

TENTANG

**TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Road Map RB Kabupaten Sumenep 2022-2026 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu adanya tindak lanjut penyelarasan penanggung jawab atas tugas masing-masing Tim Peningkatan Implementasi SAKIP Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Nomor : 188/029/KEP/435.102.1/2021 tentang Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Tahun 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana atas pengelolaan peningkatan implementasi SAKIP;
 - b. memberikan persetujuan atas rancangan/rumusan kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
2. Tim Pelaksana :
 - a. mengkoordinasikan perumusan / kebijakan implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan implementasi SAKIP
 - c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep kepada Pengarah.

3. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan meliputi Renstra, Renja, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
 - b. mengkoordinasikan tindak lanjut dan evaluasi

e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah melalui Ketua Tim Pelaksana

4. Kelompok Kerja Bidang Pelaporan :
- a. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan LKjIP
 - b. memproses penyampaian LKjIP kepada pihak yang berkepentingan.
 - c. mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi bidang pelaporan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 188/029/KEP/435.102.1/2021 tentang Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**


AGUS MULYONO, MCH

Pembina Tingkat I
NIP.19630801 198603 1 019

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep
Nomor : 188/ 472/KEP/435.102.1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	PENGARAH	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
3.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Ketua Anggota	Perencana Ahli Muda 1. Ira Widya Astuti, SKM.,M.Kes. 2. Eni Ratnawati, S.S.T., Keb. 3. Nurma Sari Puspita, SE 4. Sefrin Wulandari, SE 5. Adhitya Rifqie Maulana, S.Gz 6. Yeni Setiyo Ariyanti, A.Md.Keb. 7. Misbawati, A.Md.Kep. 8. Wiwid Merry Verayanti, A.Md.Te 9. Rery Meiheza Dany, SE
4.	Kelompok Kerja Bidang Pelaporan Ketua Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset 1. Galih Tri Marda Ningrum, SST 2. Nurrahman, A.Md.Gz 3. Fariz Yanuar Prayudha, SKM. 4. Bobby Herlambang, S.Kep.Ns., M.A.P. 5. Sawwir, SKM. 6. Pratama Hidiyanto, S.Kep.Ns. 7. Indah Winarni, SKM. 8. Heny Sri Poerwaningrum, A.Md.Keb. 9. Rudi Yanto, SE

**KEPALA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**MATRIKS RENSTRA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	0.788	0.789	0.79	0.791	0.792	0.792
		Terjaminnya Akseibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.56	71.78	72	72.22	72.44	72.66
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	85	85	85	85
			Total Fertility Rate (TFR)	2.23	2.13	2.03	1.93	1.83	1.73



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**
Jl. dr. CIPTO No. 33 TELPON (0328) 662122
E-MAIL : dinkessumenep@gmail.com
SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 409 /KEP/435.102.1/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu Indikator kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagai tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai prioritas utama kinerja Dinas Kesehatan
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan pengukuran keberhasilan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : Maret 2022

KEPALA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP



AGUS MULYONO, MCH

S Pembina Tingkat I

NIP. 19630801 198603 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sumenep
 Nomor : 118/409/KEP/435.102.1/2022
 Tanggal : Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	Anak	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=5} ASFR_i$ <ul style="list-style-type: none"> i = kelompok umur (15-19) th s/d (45-49)th $ASFR_i$ = jumlah kelahiran per 1000 perempuan kel umur (15-19)th s/d (45-49) th Total Fertility Rate adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya. 	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEPALA DINAS
 KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN SUMENEP



AGUS MULYONO, MCH
 S U Pembina Tingkat I
 NIP. 19630801 198603 1 019



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS MULYONO, MCH.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

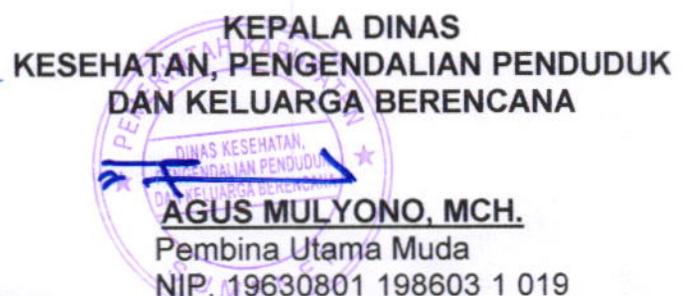
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, **25** Januari 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72 IKU-tn
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 IKU-tn
		Total Fertility Rate (TFR)	2,03 IKU-tn
2	Meningkatnya capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	95%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 137.823.404.279	APBD, DAK, Pajak Rokok, DBHCHT
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD H. MOH. ANWAR)	Rp 10.319.899.027	DAK dan DBHCHT
3	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.266.600.100	APBD, DAK dan BKK Pemprov
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 18.790.750	APBD
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 11.937.549.600	APBD, DAK dan BKK Pemprov
6	Pengendalian Penduduk	Rp 485.399.800	DAK
7	Pembinaan Keluarga Berencana	Rp 6.290.232.337	APBD dan DAK
8	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp 6.058.026.940	APBD dan DAK
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 165.917.710.711	APBD
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD H. MOH. ANWAR)	Rp 153.551.995.097	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 493.669.608.641	

Sumenep, 25 Januari 2023

PIHAK KEDUA

BUPATI SUMENEP



PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP**





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AGUSTIONO SULASNO, M.H.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Nopember 2023

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUMENEP



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

**Plt. KEPALA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



Drs. AGUSTIONO SULASNO, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660808 198603 1 005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72	IKU-tn
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	IKU-tn
		Total Fertility Rate (TFR)	2,03	IKU-tn
2	Meningkatnya capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	95%	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 137,823,404,279	Rp 159,904,441,665	APBD, DAK, Pajak Rokok, DBHCHT
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD H. MOH. ANWAR)	Rp 10,319,899,027	Rp 11,610,647,827	DAK dan DBHCHT
3	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1,266,600,100	Rp 807,259,050	APBD, DAK dan BKK Pemprov
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 18,790,750	Rp 18,790,750	APBD
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 11,937,549,600	Rp 12,889,199,600	APBD, DAK dan BKK Pemprov
6	Pengendalian Penduduk	Rp 485,399,800	Rp 485,399,800	DAK
7	Pembinaan Keluarga Berencana	Rp 6,290,232,337	Rp 6,514,485,787	APBD dan DAK
8	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp 6,058,026,940	Rp 5,833,773,490	APBD dan DAK
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 165,917,710,711	Rp 217,541,943,723	APBD
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD H. MOH. ANWAR)	Rp 153,551,995,097	Rp 158,972,584,111	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 493,669,608,641	Rp 574,578,525,803	

Sumenep, 20 November 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI SUMENEP



H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

**Pt. KEPALA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. AGUSTIONO SULASNO, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660808 198603 1 005